

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amirudin dan Askin, H. Zaenal, 2004, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada.
- Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Dari Tanah & Peralihannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- H.M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- J. Moleong, Lexi, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosyda Karya.
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumdia.
- Khudzulifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Wayan Suandra, 1994, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Boedi Harsono. 2020. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2020.
- Nandang Alamsyah. 2014. *Administratif Pertanahan*. Universitas Terbuka: Modul 1, 2014.
- Urip Santoso.2011. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Boedi Harsono.1997. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pengerjaannya*. Bandung: Djambatan, 1997.
- Maria Soemardjono. 1982. *Puspita Serangkaian Masalah Hukum Agraria*. Yogyakarta: Andi Offset, 1982.
- Adrian Sutedi. 2014. *Peralihan Hak Dari Tanah Dan Pendaftarannya*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Samun Ismaya. 2013. *Hukum Administratif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Williamson Ian P. 2000. *Best Practice of Land Administration in Developing Country*. (Jakarta: International Conference and Land Policy).

- Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara* (Yogyakarta: Irtikaz, 2011)
- Yasin Ghady, *Al-Amwal wa Al-Amlak al-‘Ammah fil Islam*.
- Mas’udi, Masdar F. (ed). *Teologi Tanah*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1994.
- Mashuda Abdur Rahman, *Pengantar dan Asas-Asas Fiqih Muamalah* (Surabaya: Biro Pengembangan Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Syari’ah, 1984).
- Mahasari, Jamaluddin, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta : Gama Media), 2008.
- Abu Ubaid Al-Qasim, *Kitab Al-Amwal*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Muhibbin M, *Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah* (Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan), 2017.

## **JURNAL**

- Andi Tenrisau. 2021. Landasan Pengelolaan Pertanahan Dalam Sistem Pembenahan Agraria Berkelanjutan. *Jurnal Pertanahan*, Volume 11 Nomor 2 (November, 2021).
- Andrian Rico. 2015. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengerjaan Tertib Administratif Pertanahan di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 1 (2015).
- Aliesa Amanita & Bayu Septiansyah. 2020. Pembenahan Sistem Informasi dan Administratif Pertanahan Tingkat Kelurahan di Kota Cimahi Dalam Rangka Reforma Agraria. *Jurnal Caraka Prabu*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2020).
- Nurul Qolifah, dkk. 2021. PKM Sosialisasi Hukum Tentang Tertib Administratif Pertanahan dan Perhitungannya di Desa Sinarmukti. *Journal of Community Services*, Volume 1 Nomor 3 (Agustus, 2021).
- Darwis Anatami. 2017. Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Dari Sebidang Tanah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12 Nomor 1 (Januari-Juni, 2017).
- Harris Yonatan Permahan Sibuea. 2011. Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. *Jurnal Negara Hukum*, Volume 2 Nomor 2 (November, 2011).
- Khairina. 2014. Sertifikat Cacat Hukum Dalam Hukum Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Juris*, Volume 13 Nomor 1 (Juni, 2014).

- Nur Azizah. 2018. Peranan Camat Dalam Memberikan Pelayanan Administratif Pertanahan di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal MSDM*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2018).
- Mira Novana Ardiani, dkk. 2022. Persoalan Tertib Administratif Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah nan Berkeadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4 Nomor 3 (2022).
- Rakhmat Wiwin Hisbullah, dkk. 2019. Asas Publisitas Pada Pengerjaan Program Nasional Agraria dalam Rangka Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik. *Jurnal Al-Azhar Islamic Review*, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2019).
- Tamrin Muchsin, dkk. 2020. Administratur Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan dan Akibat Hukum. *Jurnal Madani Legal Review*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2020).
- Al-Nabhani, Taqiyuddin, Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah, Juz II, (Beirut : Darul Ummah), 2003.
- Halim, Fatimah. Obsesi Penerapan Syari'at Islam di Wilayah Lokal. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Volume 4 No. 2. Desember 2015.
- Zallum, Abdul Qadim, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, (Beirut : Darul Ummah), 2004.
- Hamler. 2018. Hukum Tanah Dalam Hak Komunal Masyarakat. *Jurnal Ius Civil*, Volume 2 Nomor 1 (2018).
- Mira Novana Ardani. 2019. Penyelenggaraan Tertib Administratif Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pengerjaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional. *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Nomor 3 (Agustus, 2019).
- Reda Manthovani & Istiqomah. 2017. Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Volume 2 Nomor 2 (Juli, 2017).
- Harris Yonatan Parmahan Sibuea. 2011. Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. *Jurnal Negara Hukum*, Volume 2 Nomor 2 (2011).
- Fina Ayu Safitri. 2020. Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran Tanah di Kota Semarang. *Notarius*, Volume 13 Nomor 2 (2020).
- Bhim Prakoso. 2021. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *Journal of Private and Economic Law*, Volume 1 Nomor 1 (2021).
- Hairan. 2008. Pendaftaran Tanah Dalam Sertifikasi Hak Menurut Aturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Risalah Hukum, Volume 4 Nomor 1 (2008).

Risti Dwi Ramasari & Shella Aniscasary. 2022. Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Aturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Volume 2 Nomor 1 (2022).

Dadi Arja Kusuma, dkk. 2017, Sertifikat Hak Milik Dari Tanah Sebagai Alat Bukti Hak nan Kuat. Jurnal IUS, Volume 5 Nomor 2 (2017).

### **ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

### **INTERNET**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 4 November 2022 Pukul 15.00 WIB

<https://christiangamas.net/pengertian-administratif-pertanahan/> diakses pada tanggal 4 November 2022 Pukul 15.00 WIB.

<https://jatengonline.com/2023/03/29/latanla-program-bpn-kota-solo-urus-sertifikat-tanpa-ribet/>

<https://www.rumah.com/panduan-properti/pp-18-2021-57293>